

**Judul** : Jelang liburan natal & tahun baru, DPR ingatkan pemerintah waspada cuaca siklon 93S  
**Tanggal** : Minggu, 21 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Jelang Liburan Natal & Tahun Baru

# DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Cuaca Siklon 93S

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini dibayangi siklon tropis 93S yang berpotensi berdampak pada wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta meningkatkan kewaspadaan atas potensi itu.

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan, kesiapsiagaan semua pihak jadi faktor paling penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata. Pemerintah wajib mengintensifkan pemantauan perkembangan dan menyiapkan strategi antisipasi bencana hidro-meteorologi.

"Harus ada perhatian khusus, terutama terhadap wilayah padat penduduk sekaligus destinasi wisata, seperti Bali. Banjir yang sempat melanda Bali jadi sorotan dan harus dijadikan pelajaran," kata Huda dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Bentuk kesiapsiagaan itu berupa peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara real time dan mudah dipahami. Peringatan itu diintegrasikan ke dalam aplikasi-aplikasi wisata, serta penandaan zona rawan di lokasi destinasi wisata.

Situasi cuaca ekstrem bisa mengganggu keselamatan wisa-

tawan dan sistem transportasi. "Dampaknya bisa berupa penutupan bandara dan pelabuhan, putusnya jembatan, hingga kondisi jalan licin dan longsor," ujar legislator Fraksi PKB itu.

Destinasi wisata berbasis alam seperti pantai, gunung, sungai, dan air terjun, lanjut Huda, menjadi lokasi paling berisiko saat cuaca ekstrem. Karena itu, wisatawan diimbau meningkatkan kewaspadaan selama liburan akhir tahun.

"Wisatawan harus rutin memantau peringatan dini BMKG, termasuk informasi cuaca harian, gelombang laut, angin kencang, dan potensi hujan ekstrem," katanya.

Dia mengingatkan wisatawan untuk tidak memaksakan diri berangkat jika situasi destinasi wisata berisiko tinggi. Harus ada rencana cadangan agar liburan tetap menyenangkan sekaligus aman bagi diri dan keluarga. Tidak ada wisata yang seharga nyawa.

Peringatan serupa juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Dia meminta Pemerintah



Syaiful Huda

dan instansi terkait melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata menjelang libur Nataru demi menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah.

"Secara khusus untuk Pemda, harus lebih meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata," kata politikus PDIP itu.

Dia menjelaskan, cuaca ekstrem dipicu sejumlah fenomena atmosfer yang terjadi secara bersamaan saat ini tengah melanda beberapa kawasan di Tanah Air. Kondisi itu telah memicu bencana banjir, tanah longsor,

hingga pergerakan tanah di sejumlah daerah.

"Karena itu, keamanan di setiap destinasi wisata. Instansi terkait perlu rutin turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan, khususnya di lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko," ingatkannya.

Selanjutnya, infrastruktur transportasi dan akses jalan juga harus diperiksa secara berkala. Pemerintah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur yang tahan bencana karena menyangkut langsung keselamatan masyarakat. Diharapkan, masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan bencana melalui edukasi, simulasi, dan pembentukan jaringan relawan lokal.

"DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana, termasuk meminta anggota DPR yang sedang reses turun langsung ke daerah pemilihannya," ucap Menko PMK periode 2014-2019 itu.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Dinny Mutiah menyampaikan, potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dapat berdampak lang-

sung pada keselamatan wisatawan. Tiap daerah, kata dia, wajib memetakan risiko secara komprehensif di destinasi unggulan masing-masing.

Pihaknya, sambung Dinny, telah sudah menyebarkan matriks manajemen risiko kepada seluruh Pemda. Matriks ini harus diisi untuk mengidentifikasi potensi bahaya, tingkat kerawanan, hingga langkah mitigasi yang perlu disiapkan. "Tapi hingga kini masih banyak daerah yang belum mengembalikannya," bebernya.

Menurutnya, matriks itu jadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan di lapangan, mulai dari pengaturan kapasitas kunjungan, penutupan sementara destinasi berisiko tinggi, hingga kesiapsiagaan petugas dan sarana evakuasi. Tanpa pemetaan yang jelas, penanganan insiden dikhawatirkan menjadi lambat dan tidak terkoordinasi.

Kemenpar juga mengingatkan pemda untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan BPBD, kepolisian, TNI, pengelola destinasi, serta pelaku usaha pariwisata. Selain itu, informasi cuaca dari BMKG perlu disampaikan secara berkala dan mudah diakses oleh wisatawan. ■ **PYB**